

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan perusahaan merupakan *output* dari kegiatan operasional suatu organisasi. Kumpulan transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi akan digunakan oleh manajemen sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan menjadi media bagi manajemen untuk melaporkan hasil kinerja atas tugas-tugas yang telah diberikan oleh para pemilik perusahaan. Pemilik dapat menilai keberhasilan kinerja manajemen melalui informasi-informasi yang telah disampaikan dalam laporan keuangan. Selain itu, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan juga digunakan oleh para pengguna laporan keuangan (pihak eksternal) dalam membuat keputusan ekonomi.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 1, tujuan laporan keuangan adalah memberi informasi berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berdasar pengertian PSAK tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pembuatan laporan keuangan penting dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan. Laba merupakan informasi yang sangat menarik bagi pemilik maupun pihak eksternal pengguna laporan keuangan lainnya. Laba juga disebut sebagai *bottom line* karena hampir seluruh pengguna laporan keuangan akan melihat laba sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan ekonomi maupun pengukuran kinerja

manajemen. Maka, informasi mengenai laba perusahaan harus benar-benar mencerminkan kegiatan ekonomis yang sesungguhnya agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

Meskipun laba menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan ekonomi, tetapi seringkali para pengguna laporan keuangan tidak memikirkan bagaimana laba tersebut diperoleh. Bagi perusahaan perbankan dibentuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usahanya ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank akan digunakan oleh OJK dalam menentukan tingkat kesehatan suatu bank. Pengawasan terhadap kesehatan suatu bank perlu dilakukan karena bank merupakan suatu industri yang unik dan berbeda dari industri lain. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2016, setiap bank umum harus memiliki kecukupan modal minimum sesuai dengan risiko dan profil bank.

Bank merupakan perusahaan kepercayaan. Hal ini dikarenakan seluruh dana yang terdapat di dalam bank berasal dari masyarakat. Apabila masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap bank, maka dapat terjadi penarikan dana secara besar-besaran hingga menyebabkan *rush*. Maka, adanya regulasi yang ketat dari OJK diharapkan mampu menjaga kredibilitas sektor perbankan sebagai perusahaan kepercayaan. Namun, pada kenyataannya, adanya regulasi yang ketat di perusahaan perbankan dapat menjadi suatu tekanan bagi manajemen. Tekanan akan regulasi yang ketat dapat mendorong manajemen melakukan praktik manajemen laba. Manajemen laba terjadi karena adanya konflik keagenan (*agency*

*problem*) antara manajemen dan pemilik. Manajemen diberi kebebasan untuk memilih metode akuntansi yang sesuai dalam menyusun laporan keuangan. Kebebasan ini menjadi kesempatan bagi manajemen untuk menyusun laporan keuangan sesuai keinginan pribadinya. Salah satunya keinginan untuk memenuhi ketentuan regulasi yang telah ditetapkan.

Manajemen laba bukan merupakan tindakan yang dilarang ataupun merugikan selama dilakukan dalam batasan-batasan atau lingkup *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). Manajemen laba tidak dapat selalu diartikan dengan manipulasi laporan keuangan karena pemilihan metode yang dapat digunakan memang diperbolehkan dalam GAAP. Namun, tindakan manajemen laba yang dilakukan berlebihan dan berdasar kepentingan pribadi manajemen tentu dapat membuat investor keliru dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Sebagai upaya untuk meminimalisir tindakan manajemen laba, dibutuhkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Mekanisme monitoring melalui penerapan tata kelola ini diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan berbagai pihak sehingga dapat meminimalisir perilaku-perilaku oportunistik manajemen. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 menjadi dasar bagi bank umum menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan tata kelola secara efektif mengindikasikan pengendalian internal yang baik dan dapat melakukan mekanisme monitoring terhadap kinerja manajer. Penerapan tata kelola perusahaan merupakan peran yang mendasar dan tidak dapat dipisahkan dari usaha manajemen perusahaan

Berlawanan dengan hal itu, perhatian industri perbankan terhadap penerapan tata kelola perusahaan justru mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir dengan kondisi terburuk di tahun 2015 ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)). Sedangkan pada tahun 2016 Bank Bukopin (BBKP) diduga melakukan manajemen laba. Manajemen BBKP melakukan modifikasi laba bersih tahun 2016 menjadi Rp 183,56 milyar dari laba bersih sebelumnya Rp 1,08 milyar. ([www.ekonomi.kompas.com](http://www.ekonomi.kompas.com)). Dari fenomena-fenomena ini, dapat ditarik pernyataan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba.

Adanya kekhawatiran laporan keuangan akan disusun dengan keinginan manajemen sehingga informasi yang terkandung menjadi bias, mekanisme internal tata kelola perusahaan yang diterapkan diharapkan dapat menjadi solusi. Mekanisme internal tata kelola dalam penelitian ini yaitu komite pemantau risiko, komite audit, dan dewan komisaris. Komite pemantau risiko dan komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugas pengawasan. Komite pemantau risiko berusaha mengelola risiko yang mungkin terjadi di masa depan termasuk risiko praktik manajemen laba. Komite audit melakukan pengawasan dengan cara mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Dewan komisaris melakukan pengawasan dengan cara memberi nasihat-nasihat kepada dewan direksi. Adanya pengawasan dari mekanisme internal tata kelola perusahaan ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya praktik manajemen laba. Komite pemantau risiko menarik karena hanya dibentuk di bank saja mengingat risiko dan karakteristik bank yang berbeda dibandingkan yang lain. Komite pemantau risiko diukur dengan jumlah rapat, komite audit

diukur menggunakan rasio perhitungan. Sedangkan dewan komisaris diukur menggunakan jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh komite pemantau risiko, komite audit, dan ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba telah dilakukan sebelumnya dan memiliki hasil yang tidak konsisten.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Djatu (2013) menunjukkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan dewan komisaris independen, komite audit, dan *Risk Management Committee* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marismiati (2017) menunjukkan komposisi dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marpaung (2017) menunjukkan kepemilikan instusional dan dewan komisaris independen berengaruh positif terhadap manajemen laba sedangkan komite audit dan komite manajemen risiko berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurfitriana (2018) menunjukkan rasio kas, ukuran dewan komisaris, dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba sedangkan rasio modal dan komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurjannah (2019) menunjukkan kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba sedangkan dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusuma (2019) menunjukkan dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan

komite audit dan komite pemantau risiko tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wiyadi (2014) menunjukkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dan fenomena-fenomena yang terjadi dalam industri perbankan, peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah komite pemantau risiko berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh komite pemantau risiko, komite audit, dan dewan komisaris terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan belum banyak peneliti lain yang meneliti variabel komite pemantau risiko yang diwajibkan di industri perbankan. Selain itu, belum banyak peneliti yang menggunakan metode Beaver dan Engel (1996) dalam mengukur manajemen laba dalam industri perbankan, peneliti lain lebih banyak menggunakan Model Jones Dimodifikasi. Setelah variabel diuji kembali,

diharapkan dapat menjadi generalisasi pada hasil penelitian selanjutnya dan diharapkan akan menambah sumber penelitian mengenai perusahaan perbankan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut antara lain:

1. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan, pengetahuan, dan informasi yang berguna dalam menganalisis penerapan tata kelola perusahaan perbankan dalam mencegah tindak manajemen laba. Sehingga pengguna laporan keuangan dapat lebih berhati-hati dalam membuat keputusan ekonomi.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan referensi, memperluas pengetahuan dan wawasan, dan memberikan pengembangan teori terkait penerapan tata kelola dan pengaruhnya terhadap manajemen laba di industri perbankan. Hal ini karena adanya variabel baru yaitu komite pemantau risiko yang masih belum banyak diteliti.

3. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan koreksi bagi pihak perbankan dalam penerapan mekanisme internal tata kelola perusahaan yang efektif.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

#### BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II KOMITE PEMANTAU RISIKO, KOMITE AUDIT, DEWAN KOMISARIS, DAN MANAJEMEN LABA

Terdiri dari teori keagenan, manajemen laba, *good corporate governance* komite pemantau risiko, komite audit, dewan komisaris, hasil penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, sampel dan teknik pengambilan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan teknik pengumpulan data, uji pendahuluan, dan uji hipotesis.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari hasil uji normalitas, hasil uji asumsi klasik, hasil statistik deskriptif, hasil uji hipotesis, dan pembahasan.

#### BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan, keterbatasan, dan saran penelitian.